

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data serta pemecahan masalah maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pada kinerja operasional jaringan trayek angkutan perdesaan eksisting di Kabupaten Buleleng ditemukan trayek yang bermasalah. Diantaranya indikator frekuensi, headway, dan faktor muat pada masing-masing trayek angkutan perdesaan yang masih beroperasi. Frekuensi trayek AP 3, trayek AP 7, dan trayek AP 15 masing-masing adalah 1 kendaraan per jam. Load faktor untuk trayek AP 3 sebesar 18,87%, trayek AP 7 sebesar 22,19% dan trayek AP 15 sebesar 22,71%. Sedangkan headway pada trayek AP 3 adalah 50 menit, trayek AP 7 adalah 57 menit, dan trayek AP 15 adalah 42 menit.
2. Dari hasil pembebanan didapatkan 4 trayek angkutan perdesaan yang memiliki permintaan penumpang. Diantaranya Trayek AP 1 dengan jumlah permintaan 3062 orang/hari, Trayek AP 3 dengan jumlah permintaan 1028 orang/hari, Trayek AP 7 dengan jumlah permintaan 1390 orang/hari, dan Trayek AP 15 dengan jumlah permintaan 2010 orang/hari.
3. Jumlah kebutuhan armada jaringan trayek usulan di Kabupaten Buleleng sebanyak 96 unit dengan jenis kendaraan Mobil Penumpang Umum berkapasitas 8 penumpang.
4. Terdapat usulan layanan angkutan pedesaan trayek AP 1 yaitu layanan ekspres. Pada layanan ekspres terdapat sistem penjadwalan agar layanan angkutan dapat beroperasi secara maksimal.

5. Jenis kendaraan pada layanan usulan AP 1 expres adalah bus besar dengan kapasitas 49 penumpang duduk. Dengan kebutuhan armada 9 unit.

## **6.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengkajian Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada setiap trayek untuk menentukan tarif yang tepat agar sesuai dengan biaya operasional dan kemampuan masyarakat Kabupaten Buleleng sehingga penyelenggaraan angkutan perdesaan di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan secara berkelanjutan.
2. Perlu dilakukan pembangunan dan peremajaan prasarana penunjang angkutan perdesaan di Kabupaten Buleleng seperti pembangunan dan peremajaan fasilitas pejalan kaki menuju halte dan terminal.
3. Perlu dilakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap operator angkutan perdesaan di Kabupaten Buleleng sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam operasional angkutan untuk meningkatkan tingkat kehandalan angkutan perdesaan.